

POTRET FASILITAS PERKOTAAN DI INDONESIA TIMUR/BARAT: STUDI PERBANDINGAN KOTA SURABAYA DAN KOTA PALU

**Yunde Almoora Dwison I¹⁾, Jiniar Dudung²⁾, Satrio Ahmad³⁾, Moh. Arya⁴⁾,
Ramadhan Afdal Risqullah⁵⁾, Rachmad⁶⁾**

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
almoonradwisonal@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
dudungjiniar1441@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
moharya0411@gmail.com

⁴ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
afdalramadhan0@gmail.com

⁵ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
ahmadsatrio2806@gmail.com

⁶ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
rachmadmhad8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata Pembangunan teknologi, informasi dan infrastruktur Pembangunan di Indonesia timur/barat dan fokus pada perbandingan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, infrastruktur sangat penting untuk menciptakan interkoneksi antar pulau di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai kondisi sarana dan prasarana di Kota Surabaya maupun Kota Palu. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis komparatif kualitas terhadap kondisi sarana dan prasarana (saprass) di Kota Surabaya dan Kota Palu. Temuan komparatif memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara kedua wilayah, yang tidak terlepas dari latar belakang Sejarah perkembangan kota, fungsi dan peran strategis wilayah, kondisi sosial ekonomi Masyarakat, serta karakteristik dan tantangan geografis yang dihadapi masing-masing daerah. Dari sisi fasilitas perkotaan di Kota Surabaya relatif lebih lengkap, terintegrasi, dan berkelanjutan dibandingkan dengan Kota Palu. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor kapasitas fiskal daerah, tingkat urbanisasi, pengalaman historis pembangunan, serta dampak bencana alam yang dialami Kota Palu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih berkeadilan antarwilayah.

Kata kunci: Fasilitas Perkotaan, Pembangunan Wilayah, Ketimpangan Regional

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the average development of technology, information, and infrastructure in eastern/western Indonesia and focuses on the comparison between the western and eastern regions of Indonesia in the context of Indonesia as an archipelagic country, infrastructure is very important to create interconnectivity between islands in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive-comparative method. Data were obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation studies of regional development policies and planning. This study focuses on an in-depth understanding of the condition of facilities and infrastructure in the cities of Surabaya and Palu. The results of this study are compiled based on a comparative analysis of the quality of the condition of facilities and infrastructure (saprasi) in the cities of Surabaya and Palu. Comparative findings show quite striking differences between the two regions, which are inseparable from the historical background of city development, the function and strategic role of the region, the socio-economic conditions of the community, as well as the characteristics and geographical challenges faced by each region. In terms of urban facilities in the city of Surabaya is relatively more complete, integrated, and sustainable compared to the city of Palu. These differences are influenced by factors such as regional fiscal capacity, the level of urbanization, historical experience of development, and the impact of natural disasters experienced by the city of Palu. This research is expected to provide academic and practical contributions to the development of more equitable urban development policies across regions.

Keywords: *Urban Facilities, Regional Development, Regional Inequality*

Submisi: 16-12-2025

Diterima: 17-12-2025

Dipublikasikan: 02-02-2026

PENDAHULUAN

Surabaya dikenal sebagai pusat pertumbuhan utama di kawasan Indonesia Timur karena memiliki basis industri manufaktur dan sektor agrikultur yang kuat, yang menghasilkan berbagai produk untuk kebutuhan ekspor. Salah satu infrastruktur yang membuat Kota Surabaya cukup dominan diantara kota-kota besar lainnya yaitu pada Pelabuhan Kapal atau disebut Tanjung Perak.

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berperan sebagai pintu gerbang penghubung antara wilayah Indonesia Barat dan Timur, termasuk bagi mitra dagang regional dan internasional. Kota Surabaya didirikan pada tanggal 31 Mei 1293, yang dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006–2010, Surabaya menetapkan visi “Surabaya Cerdas dan Peduli,” yaitu sebuah kota yang cerdas dalam menghadapi peluang dan tuntutan global, serta memiliki tingkat kepedulian tinggi dalam membangun struktur pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, bermartabat, dan berlandaskan lingkungan yang sehat, (Sumber: JICA, 2025).

Palu dikenal sebagai sebuah “Kota Baru” yang berada di kawasan muara sungai. Kota Palu secara resmi didirikan sebagai Kota Administratif pada tanggal 27 September 1978, dan pada dasarnya merupakan wilayah yang baru mulai dihuni penduduk (*De Aste Toradja's van Midden Celebes*). Cikal bakal terbentuknya Kota Palu berawal dari masyarakat Desa Bontolevo yang bermukim di Pegunungan Ulayo. Setelah terjadi perpindahan penduduk menuju daerah dataran rendah, mereka kemudian menetap di sebuah lokasi yang kini dikenal dengan nama Boya Pogego, (Sumber: Kota Palu, 2025).

Ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu isu krusial dalam pembangunan wilayah saat ini adalah masih lebarnya kesenjangan antar daerah, terutama antara kawasan Barat Indonesia dan kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini turut berkontribusi pada ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia, di mana terdapat perbedaan yang cukup mencolok di setiap daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia. Pembangunan ekonomi selama ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau negara dalam jangka panjang. Proses pembangunan ekonomi merupakan upaya multidimensional yang hingga reorientasi dalam sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan mencakup keseluruhan sistem sosial, termasuk aspek politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan IPTEK, kelembagaan, hingga kebudayaan.

Teknologi digital terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, mulai dari bentuk yang sederhana hingga yang kompleks. Menurut RPJMN 2015-2019, Kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu isu pembangunan yang menjadi perhatian. Pembangunan infrastruktur yang terlalu terpusat di Pulau Jawa membuat pulau-pulau lainnya tertinggal, sehingga menciptakan ketimpangan perekonomian antar pulau. Menurut Badan Pusat Statistik dan Pulau Sumatera yang berada di KBI menyumbang persentase terbesar dari

total PDB Nasional Tahun 2019, yaitu 59% dari Pulau Jawa dan 21,31% dari Pulau Sumatera. Sementara itu pulau-pulau yang berada di KTI hanya menyumbang 2%-8% dari total PDB Nasional.

Septinar, et. al., (2018) menyatakan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan lingkungan. Selain dari sektor ekonomi, KBI dan KTI juga memiliki kesenjangan pada sektor-sektor lainnya seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

Perkotaan merupakan pusat aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Keberadaan fasilitas perkotaan yang memadai menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Fasilitas perkotaan mencakup berbagai sarana dan prasarana publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau, serta utilitas dasar yang mendukung kehidupan masyarakat kota. Menurut Pacione (2009), fasilitas perkotaan berfungsi sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga kualitas dan pemerataannya sangat menentukan daya saing serta keberlanjutan kota.

Pembangunan perkotaan masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan antarwilayah, khususnya antara Indonesia bagian Barat dan Timur. Kota-kota di wilayah Barat, terutama di Pulau Jawa, cenderung mengalami perkembangan fasilitas yang lebih pesat dibandingkan kota-kota di wilayah Timur. Kondisi ini tidak terlepas dari perbedaan kapasitas ekonomi, kepadatan penduduk, serta prioritas kebijakan pembangunan yang telah berlangsung sejak lama.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia bagian Barat menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan fasilitas perkotaan yang modern dan terintegrasi. Sebaliknya, Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengembangan fasilitas perkotaan, terlebih setelah mengalami bencana alam besar pada tahun 2018. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada perbandingan fasilitas perkotaan di Kota Surabaya dan Kota Palu guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pembangunan perkotaan di dua wilayah yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kondisi fasilitas perkotaan berdasarkan perspektif aktor-aktor yang terlibat serta konteks sosial dan kebijakan yang melingkupinya. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan realitas sosial secara komprehensif.

Lokasi penelitian meliputi Kota Surabaya dan Kota Palu. Informan penelitian terdiri atas masyarakat pengguna fasilitas publik, aparat pemerintah daerah, serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan wilayah dan kota. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap fasilitas perkotaan, dan studi dokumentasi terhadap rencana pembangunan daerah.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data penelitian, yaitu menggunakan model interaktif yang di kemukakan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) terdiri dari empat alur yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini disusun berdasarkan Analisis Komparatif Kualitatif terhadap kondisi sarana dan prasarana (saprass) di Kota Surabaya dan Kota Palu. Temuan komparatif memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara kedua wilayah, yang tidak terlepas dari latar belakang sejarah perkembangan kota, fungsi dan peran strategis wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta karakteristik dan tantangan geografis yang dihadapi masing-masing daerah. Perbandingan Tingkat Ketersediaan, Pemerataan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan observasi lapangan serta telaah dokumen melalui pendekatan kualitatif, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat ketersediaan, pemerataan, dan kualitas infrastruktur. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi status pembangunan dan kompleksitas sistem sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing kota. Kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan, terutama setelah bencana alam hebat. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana, Kota Palu berupaya menciptakan ekosistem kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki sistem transportasi perkotaan yang relatif lebih maju dan terintegrasi. Keberadaan jaringan jalan yang memadai, angkutan umum massal, serta pengelolaan lalu lintas yang lebih baik memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat. Sebaliknya, Kota Palu masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan transportasi umum, sehingga masyarakat cenderung bergantung pada kendaraan pribadi.

Fasilitas perkotaan didefinisikan sebagai seluruh sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang aktivitas penduduk di wilayah perkotaan. Lynch (1960) menekankan bahwa fasilitas perkotaan harus dirancang secara terstruktur dan mudah diakses agar dapat membentuk lingkungan kota yang fungsional dan berkelanjutan. Sementara itu, Jacobs (1961) memandang fasilitas kota sebagai elemen penting dalam menciptakan kehidupan perkotaan yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Aspek kesehatan, Kota Surabaya memiliki fasilitas layanan kesehatan yang lengkap mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan nasional. Kota Palu telah memiliki fasilitas kesehatan dasar yang cukup, namun masih terbatas dalam layanan kesehatan spesialis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas dan akses layanan kesehatan antara kedua kota.

Kota Surabaya unggul dalam penyediaan fasilitas pendidikan, terutama pendidikan tinggi dan sarana pendukung pembelajaran. Sementara itu, Kota Palu masih dalam tahap

pengembangan. Dalam hal ruang publik, Surabaya menunjukkan pengelolaan ruang terbuka hijau yang relatif baik, sedangkan Palu masih berupaya membangun kembali ruang publik yang terdampak bencana.

Teori pembangunan wilayah yang dikemukakan oleh Friedmann (1986) menjelaskan bahwa kota-kota besar cenderung berkembang lebih cepat karena adanya akumulasi modal, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Kota-kota di wilayah pinggiran atau berkembang seringkali tertinggal akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya tersebut. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini tercermin pada perbedaan fasilitas perkotaan antara wilayah Barat dan Timur.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat pengguna fasilitas transportasi, Kota Surabaya menunjukkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang relatif memadai dan terintegrasi. Informan menyatakan bahwa kondisi jalan utama dan jalan lingkungan umumnya berada dalam kondisi baik, dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, serta trotoar yang fungsional. Selain itu, keberadaan angkutan umum massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan layanan transportasi berbasis aplikasi memudahkan mobilitas masyarakat lintas wilayah kota.

Sebaliknya, di Kota Palu, hasil observasi menunjukkan bahwa jaringan transportasi perkotaan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Informan menyampaikan bahwa ketersediaan angkutan umum konvensional masih terbatas baik dari segi jumlah armada maupun jangkauan rute. Kondisi beberapa ruas jalan lingkungan juga masih memerlukan peningkatan kualitas, terutama di kawasan permukiman pascabencana.

Berdasarkan data BPS (2024) Kota Surabaya, panjang jalan beraspal pada tahun terakhir pengamatan mencapai lebih dari 95 persen dari total jaringan jalan kota. Sementara itu, data BPS Kota Palu menunjukkan bahwa persentase jalan beraspal berada pada kisaran 70–75 persen, dengan konsentrasi jalan rusak ringan hingga sedang masih ditemukan di sejumlah kecamatan. Data ini memperkuat temuan lapangan terkait perbedaan kualitas fasilitas transportasi di kedua kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki sistem transportasi perkotaan yang relatif lebih maju dan terintegrasi. Keberadaan jaringan jalan yang memadai, angkutan umum massal, serta pengelolaan lalu lintas yang lebih baik memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat. Sebaliknya, Kota Palu masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan transportasi umum, sehingga masyarakat cenderung bergantung pada kendaraan pribadi.

Hasil wawancara dengan tenaga kesehatan dan masyarakat pengguna layanan kesehatan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan relatif mudah, baik dari segi jarak maupun ketersediaan layanan. Masyarakat menyatakan bahwa keberadaan rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, serta puskesmas yang tersebar merata memberikan rasa aman dalam pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan.

Kota Palu, temuan lapangan menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan dasar telah tersedia, namun masih terdapat keterbatasan pada layanan kesehatan spesialis. Informan menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus tertentu, pasien harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan lanjutan, yang berdampak pada biaya dan waktu tempuh.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2025) menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki lebih dari 60 rumah sakit dan ratusan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu memiliki jumlah rumah sakit yang relatif terbatas, dengan rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk yang masih berada di bawah rata-rata nasional.

Dalam aspek kesehatan, Kota Surabaya memiliki fasilitas layanan kesehatan yang lengkap mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan nasional. Kota Palu telah memiliki fasilitas kesehatan dasar yang cukup, namun masih terbatas dalam layanan kesehatan spesialis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas dan akses layanan kesehatan antara kedua kota.

Berdasarkan hasil observasi, Kota Surabaya memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Informan dari kalangan pelajar dan mahasiswa menyatakan bahwa sarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang belajar publik tersedia dengan baik. Selain itu, keberadaan ruang publik seperti taman kota dan jalur pedestrian dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat.

Kota Palu, fasilitas pendidikan dasar dan menengah relatif tersedia, namun untuk pendidikan tinggi dan sarana pendukung pembelajaran masih terbatas. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa ruang publik kota masih dalam tahap pengembangan, khususnya di kawasan yang terdampak bencana alam.

Menurut data BPS (2024), Kota Surabaya memiliki jumlah perguruan tinggi yang jauh lebih banyak dibandingkan Kota Palu. Selain itu, luas ruang terbuka hijau publik di Kota Surabaya telah mendekati ketentuan minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Sementara itu, Kota Palu masih berupaya meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau sebagai bagian dari proses pemulihan dan pembangunan berkelanjutan.

Kota Surabaya unggul dalam penyediaan fasilitas pendidikan, terutama pendidikan tinggi dan sarana pendukung pembelajaran. Sementara itu, Kota Palu masih dalam tahap pengembangan. Dalam hal ruang publik, Surabaya lebih baik dari pada ruang publik yang terdapat di Kota Palu.

Berdasarkan hasil yang didapat, ternyata Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia hanya memiliki perbedaan pada kualitas tutupan lahan saja, kedua kawasan tidak memiliki perbedaan kualitas air ataupun udara. Selain dari segi aspek peningkatan Pembangunan Kota Palu yang dikenal dengan karakter wilayah lima dimensinya menunjukkan perkembangan sarana prasarana yang masih berada pada fase penguatan. Tantangan geografis terutama adanya sungai, teluk, dan daerah pegunungan memberikan pengaruh pada pemerataan pembangunan. Ketersediaan sarana transportasi, infrastruktur jalan, jaringan air bersih, serta berbagai fasilitas umum terus mengalami peningkatan, meskipun cakupannya belum seluas dan sekompleks Surabaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut di atas, bahwa fasilitas perkotaan di Surabaya lebih berkembang dan beragam dibandingkan Palu, terutama dalam skala transportasi, kesehatan, pendidikan, dan ruang publik. Kota Palu menunjukkan

potensi pertumbuhan fasilitas yang kuat, tetapi masih menghadapi tantangan sumber daya dan dampak bencana. Faktor penentu perbedaan kedua kota termasuk kapasitas ekonomi, pendanaan pembangunan, dukungan kebijakan, serta sejarah urbanisasi masing-masing wilayah. Pemerintah Kota Palu perlu memperkuat integrasi sistem transportasi dan meningkatkan layanan kesehatan spesialis. Surabaya dapat menjadi model dalam mengembangkan ruang publik yang partisipatif. Perlu penelitian lanjutan berupa analisis kuantitatif dan longitudinal untuk memperkuat temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Friedmann, J. 1986. The World City Hypothesis. *Development and Change*. International Institute of Social Studies, Vol. 17(1), pages 69-83.
<https://ideas.repec.org/a/bla/devchg/v17y1986i1p69-83.html>
- Jacobs, J. 1961. *The Death and Life of Great American Cities*. New York: Random House, Inc.
- JICA (Japan International Cooperation Agency). 2007. *The Study For Development Of The Greater Surabaya Metropolitan Ports In The Republic Of Indonesia*. Laporan Akhir Directorate General Of Sea Transportation, Ministry Of Transportation. ALMEC Corporation Japan Port Consultants, LTD. diakses tanggal 17 November 2025.
<https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11868676.pdf>
- Lynch, K. 1960. *The Image of the City*. Cambridge: MIT Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Palu, Kota. 2025. *Sejarah Kota Palu*. diakses tanggal 17 November 2025.
<https://pipro.palukota.go.id/maps/public/pages/sejarah>

TENTANG PENULIS